

## Frequently Asked Questions (FAQ)

### Proses Sinkronisasi Usulan DAK Fisik Tahun 2019

#### Permasalahan umum

No.	Isu	Keterangan
1.	Jika ada catatan Pusat meminta perbaikan data usulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status usulan harus “Discuss” agar dapat diubah datanya</li> <li>Cara perubahan merujuk kepada manual dan hanya bisa untuk: Nomenklatur Detail Rincian, Volume, Unit Cost, dan Lokasi (wilayah)</li> <li>Harus diperhatikan bahwa perubahan unit cost dapat naik atau turun. Jika naik tidak boleh melebihi total usulan per-subbidang / bidang tersebut</li> <li>Setelah ubah data, maka klik <b>SUBMIT PERBAIKAN</b> jika dirasakan perubahan data sudah <b>final</b> agar muncul notifikasi perubahan</li> </ul>
2.	Jika ada usulan yang diberikan catatan Pusat untuk diubah datanya namun status masih approve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status usulan harus “Discuss” agar dapat diubah datanya</li> <li>Cara perubahan merujuk kepada manual (bisa dengan klik “belum terdaftar” ketika menu untuk ubah data sudah terbuka dan ketik nama ruas jalannya).</li> <li>Agar status dapat berubah discuss (sebelumnya approve), maka OPD atau Bappeda dapat berkoordinasi langsung dengan K/L</li> </ul>
3.	Jika ada catatan Pusat untuk mengubah menu (Contoh untuk bidang irigasi, dari menu peningkatan ke rehabilitasi atau sebaliknya) atau mengubah rincian kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan menu kegiatan atau rincian kegiatan <b>TIDAK DAPAT DIMUNGKINKAN</b> di dalam aplikasi selama proses sinkronisasi</li> <li>Pemda tidak perlu merespon dengan mengubah data apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> <li>Namun jika memang menyetujui catatan Pusat untuk pemindahan dapat menulis di kolom Catatan Daerah “Pemda menyetujui catatan Pusat mengenai dibutuhkannya pemindahan menu kegiatan yang lebih relevan”</li> <li>Namun, usulan yang salah tersebut <b>MOHON TIDAK DIHAPUS</b> karena isu ini masih akan diputuskan di tingkat Pusat setelah tanggal 20 Agustus 2018</li> </ul>

No.	Isu	Keterangan
	Jika ada catatan Pusat bahwa jenis tidak sesuai (Contoh untuk bidang air minum atau sanitasi, dari seharusnya reguler ke penugasan tau sebaliknya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan jenis <b>TIDAK DAPAT DIMUNGKINKAN</b> di dalam aplikasi selama proses sinkronisasi</li> <li>Pemda tidak perlu merespon dengan mengubah data apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> <li>Namun jika memang menyetujui catatan Pusat untuk pemindahan dapat menulis di kolom Catatan Daerah “Pemda menyetujui catatan Pusat mengenai dibutuhkannya pemindahan jenis yang lebih relevan”</li> <li>Namun, usulan yang salah tersebut <b>MOHON TIDAK DIHAPUS</b> karena isu ini masih akan diputuskan di tingkat Pusat setelah tanggal 20 Agustus 2018</li> </ul>
4.	Usulan banyak ditolak namun secara teknis sudah dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat menilai berdasarkan kriteria teknis dan pagu indikatif. Sangat memungkinkan terdapat usulan yang layak secara teknis namun di <i>reject</i> karena keterbatasan pagu alokasi</li> </ul>
5.	Ingin menambah usulan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan usulan baru di KRISNA DAK <b>TIDAK DIMUNGKINKAN</b></li> <li>Jika usulan diajukan untuk bidang DAK yang memiliki forum tatap muka (infrastruktur dan pendidikan), dapat disampaikan untuk dicatat manual dan diusulkan di tahun mendatang</li> </ul>
6.	Apakah penilaian Pusat bersifat final?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada prinsipnya semua hasil penilaian telah mempertimbangkan kesesuaian data usulan dan <i>budget constrain</i>, namun jika ada concern tertentu dari daerah dapat disampaikan dalam catatan daerah</li> </ul>
7.	Jika status usulan di-reject dengan keterangan yang kurang jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah dapat meminta konfirmasi Pusat dengan menulis di catatan (status reject TETAP dapat menambah catatan) → lalu klik Submit Perbaikan</li> </ul>
8.	Adanya catatan “didiskusikan lebih lanjut”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya DAK bidang infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman) serta DAK bidang pendidikan yang memiliki forum tatap muka dalam pembahasan usulan sementara sisanya proses “diskusi lebih lanjut” dimaksud adalah proses saling merespon catatan aplikasi KRISNA DAK (Pusat merespon catatan K/L dan sebaliknya)</li> <li>Jika tidak ada catatan spesifik, maka proses diskusi yang dimaksud adalah proses diskusi di tingkat Pusat dengan memperhatikan keterbatasan pagu</li> </ul>

No.	Isu	Keterangan
9.	Jika diminta untuk upload dokumen pendukung tertentu (misalnya DED, TOR, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kelengkapan dapat diunggah di google drive dan link dicantumkan dalam data teknis</li> <li>Atau, setelah unggah dokumen dalam google drive maka link google drive tersebut dicantumkan di dalam catatan daerah misalnya dengan kalimat "Dokumen pendukung telah disiapkan sesuai dengan catatan K/L dan dapat diunduh di link :  <i><a href="https://drive.google.com/open?id?=1pnlPxZy">https://drive.google.com/open?id?=1pnlPxZy</a></i>"</li> </ul>
10.	Apakah perlu melakukan SUBMIT PERBAIKAN setelah perubahan data dilakukan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Submit usulan dapat dilakukan oleh kedua akun (Bappeda dan OPD), namun untuk perbaikan harus menggunakan akun pengusul.</li> <li>Submit perbaikan di-klik setelah perubahan data dianggap final sebab setelah submit perbaikan maka data tidak dapat diubah kembali</li> <li>Setelah submit perbaikan maka status usulan akan berubah dari "Discuss menjadi No Action" yang selanjutnya akan ditindaklanjuti Pusat untuk menentukan menjadi approve atau reject</li> <li>Submit perbaikan penting karena akan ada notifikasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pusat</li> </ul>
11.	Jika user tidak dapat mengubah data usulan / submit perbaikan /menambah catatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cek role dari user</li> <li>Hanya Instansi pengusul yang dapat mengubah data, submit perbaikan, dan menambah catatan</li> <li>Bappeda (user operator) yang bukan instansi pengusul dapat submit perbaikan, menambah catatan, dan mengubah urutan prioritas</li> <li>Admin dan Kepala Bappeda tidak dapat submit perbaikan ataupun mengubah prioritas (hanya dapat melihat usulan dan menambah catatan)</li> </ul>
12.	Jika user tidak dapat akses ke aplikasi untuk melihat status usulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cek role dari user apakah sudah terdaftar di portal daerah tersebut</li> <li>Jika belum, maka admin yang dapat menambah user tersebut ke dalam portal daerah tersebut</li> </ul>
13.	Apakah usulan dengan status reject dapat meminta diubah menjadi approve?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mohon fokus pada usulan dengan status <i>approve</i> dan <i>discuss</i> (terutama yang diberikan catatan Pusat untuk menyesuaikan data)</li> <li>Jika benar- benar ada urgensi untuk diubah (misalnya arahan Kepala Daerah atau memang ada kendala</li> </ul>

No.	Isu	Keterangan
		pelaksanaan seperti tidak ada kepemilikan lahan untuk usulan dengan status approve sehingga butuh diganti), maka dapat membuat catatan yang meminta perubahan penilaian (catatan daerah) atau dengan berkoordinasi ke K/L
14.	Tidak ada role admin di portal daerah atau user admin hanya dapat melihat beberapa bidang saja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mohon kontak ke Pusat (Bappenas atau Kemenkeu) untuk dipuihkan kembali user admin di portal daerah tsb</li> </ul>
15.	Adanya catatan Pusat yang meminta upload data teknis atau dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menginput data teknis atau mencantumkan link google drive (setelah upload dokumen tertentu) di data teknis. Namun saat ini data teknis belum dapat diubah</li> <li>Alternatif lainnya adalah dengan mencantumkan data atau link google drive di catatan daerah</li> </ul>
16.	Jika tidak dapat masuk ke dalam aplikasi KRISNA DAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cek stabilitas koneksi internet</li> </ul>
17.	Jikas lupa password	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat klik “lupa password” di laman awal login dan password baru akan dikirim ke email yang dicantumkan</li> <li>Atau dapat mendaftar dengan email lain dan menghubungkan Bappeda (admin) untuk menambah ke dalam portal daerah tersebut dan di-set sesuai role yang diinginkan (OPD atau Bappeda)</li> </ul>
18.	Jika ada pergantian personil dan tidak mengetahui password untuk masuk ke aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mendaftar ke aplikasi KRISNA DAK dengan email lain dan menghubungkan Bappeda (admin) untuk menambah ke dalam portal daerah tersebut</li> <li>Cara pendaftaran ada di manual pengusulan (dalam aplikasi) atau dengan meminta dipandu Bappeda</li> </ul>
19.	Ingin mengubah satuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dapat mengubah satuan usulan karena bersifat given</li> </ul>
20.	Jika ada catatan Pusat untuk mengubah prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>User Bappeda (operator bukan Admin) dapat mengubah urutan prioritas di level rincian kegiatan</li> </ul>
21.	Jika memang tidak ada usulan karena tidak dapat mengakses ke menu tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk bidang penugasan, tidak semua daerah dapat mengusulkan karena hanya untuk lokasi prioritas (lokpri)</li> </ul>

No.	Isu	Keterangan
22.	Dimana dapat melihat penilaian pusat secara keseluruhan/print hasil penilaian pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melihat melalui Rekap DAK/Laporan</li> <li>Melihat melalui Rekap DAK/Laporan/Pivot Table (untuk memilih data yang ingin ditampilkan)</li> </ul>
23.	Usulan berstatus approve namun sudah ada pendanaan lain atau terjadi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkonfirmasi ke Pusat dengan meminta usulan diubah menjadi ditolak dan memindahkan lokasi yang memungkinkan</li> </ul>

### Isu per-bidang DAK Fisik

No.	Bidang	Isu	Keterangan
1.	Pendidikan	Adanya catatan dari Pusat bahwa “Sekolah tidak sesuai dengan NPSN”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda dapat mengusulkan perubahan (menuliskan catatan daerah)</li> <li>Namun harus diingat bahwa usulan tersebut akan bersifat “cadangan” mengingat saat ini penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan pagu indikatif bidang Pendidikan</li> <li>Pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan pada forum sinkronisasi DAK bidang Pendidikan yang akan dilaksanakan dalam 3 gelombang sejak tanggal 12 Agustus (mohon diperhatikan jadwalnya dan koordinasi antara Bappeda serta OPD)</li> </ul>
2.	Kesehatan	Adanya respon Pusat “akan didiskusikan lebih lanjut” tanpa permintaan penyesuaian data yang spesiifik	<ul style="list-style-type: none"> <li>“Diskusi yang dimaksud bukan dalam bentuk forum tatap muka melainkan diskusi di tingkat Pusat (antara <i>stakeholder</i> terkait dengan memperhatikan keterbatasan pagu DAK bidang kesehatan )</li> <li>Pemda tidak perlu merespon apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> </ul>
		Adanya catatan Pusat “ditolak pada saat Rakontek” sementara pada saat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Rakontek diterima karena hanya melihat pemenuhan data teknis atau syarat lainnya namun belum ada pagu indikatif per-bidang (bersifat medium list)</li> </ul>

No.	Bidang	Isu	Keterangan
		Rakontek sebenarnya diterima dan ada Berita Acaranya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan keterbatasan pagu, maka perlu dibuat short list sehingga tidak semua usulan yang diterima saat Rakontek dapat dibiayai</li> <li>Pemda tidak perlu merespon apapun, termasuk tidak perlu Klik "Submit Perbaikan"</li> </ul>
3.	Pariwisata	Adanya catatan "didiskusikan lebih lanjut" atau "volume, unit cost , da	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Diskusi yang dimaksud bukan dalam bentuk forum tatap muka melainkan diskusi di tingkat Pusat</li> <li>Pemda hanya perlu merespon catatan Pusat yang lebih spesifik (misalnya catatan K/L atau PPN yang meminta perubahan data)</li> <li>Perubahan data dapat dilakukan berulang kali, dan jika dirasa tidak akan mengubah data lagi maka klik Submit Perbaikan → nantinya status akan menjadi "No Action" dengan notifikasi (icon pensil) untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penilaian akhir oleh Pusat setelah tanggal 20 Agustus 2018</li> </ul>
		Adanya catatan Pusat yang meminta klarifikasi data misalnya hak milik tanah dll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan dapat direspon di kolom "tambah catatan" misalnya dengan menuliskan <i>"Kami memiliki dokumen sertifikat kepemilikan tanah sesuai dengan pertemuan verifikasi data teknis pada tanggal 02 Juli 2018 dan dapat diunduh dalam link <a href="https://drive.google.com/open?id?=1pnIPxZy">https://drive.google.com/open?id?=1pnIPxZy</a>"</i> → sebelumnya upload dahulu dokumen tersebut di google drive</li> <li>Atau dapat juga mengirimkan scan dokumen tersebut ke email: <a href="mailto:dakpariwisata@kemenpar.go.id">dakpariwisata@kemenpar.go.id</a></li> </ul>

No.	Bidang	Isu	Keterangan
		Adanya catatan dari Pusat “nilai usulan di atas standar biaya yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar biaya yang dimaksud dapat dilihat pada Permenpar No.3 Tahun 2018 tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik bidang Pariwisata Tahun 2018 (dokumen terdapat di aplikasi KRISNA DAK di menu dokumentasi → LAIN-LAIN)</li> <li>Pada dokumen tersebut dinyatakan bahwa standar biaya menggunakan standar biaya jakarta dan blm mempertimbangkan aspek kemahalan dan estetika. Dalam hal ini daerah bisa menyesuaikan atau juga tidak menyesuaikan. Apabila nilai usulan diatas standar biaya pada Petunjuk operasional maka RAB-nya harus disahkan oleh dinas PU sebagai dokumen pelaporan antisipasi untuk pemeriksaan kedepannya karena mgkn daerah mengusulkan belum memiliki rab (blm dipertimbangkan nilai usulannya/asal). Jika sdh ada RAB dan memang ternyata diatas standar maka RAB harus disahkan oleh Dinas PU dan daerah melakukan klarifikasi atau menanggapi saja pada catatan daerah.</li> </ul>
4.	Irigasi	Adanya catatan Pusat untuk “mengubah menu kegiatan”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan menu kegiatan <b>TIDAK DAPAT DIMUNGKINKAN</b> di dalam aplikasi selama proses sinkronisasi</li> <li>Pemda tidak perlu merespon dengan mengubah data apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> <li>Namun jika memang menyetujui catatan Pusat untuk pemindahan dapat menulis di kolom Catatan Daerah “Pemda menyetujui catatan Pusat mengenai dibutuhkannya pemindahan menu kegiatan yang lebih relevan”</li> <li>Selanjutnya catatan mengenai kebutuhan pemindahan akan dibahas di tingkat Pusat</li> </ul>
5.	Jalan	Adanya catatan Pusat untuk “mengubah ruas jalan”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status usulan harus “Discuss” agar dapat diubah datanya</li> <li>Cara perubahan merujuk kepada manual (bisa dengan klik “belum terdaftar” ketika</li> </ul>

No.	Bidang	Isu	Keterangan
			<p>menu untuk ubah data sudah terbuka dan ketik nama ruas jalannya).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namun harus diingat bahwa nama ruas jalan yang akan diganti tidak boleh dipergunakan sebelumnya karena akan terduplikasi dan tidak disimpan</li> </ul>
		Jika daerah meminta perubahan ruas yang di-approve (misalnya yang sebelumnya reject dirasa lebih penting dibanding yang di-approve)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemda dapat membuat catatan di masing – masing detail rincian tersebut (baik yg sebelumnya reject atau approve atau sebaliknya)</li> </ul>
6.	Air Minum	Adanya catatan Pusat yang meminta untuk menyesuaikan unit cost (menurunkan unit cost) sementara status “approve”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status usulan harus “Discuss” agar dapat diubah datanya</li> <li>Cara perubahan merujuk kepada manual</li> <li>Agar status dapat berubah discuss (sebelumnya approve), maka OPD atau Bappeda dapat berkoordinasi langsung dengan K/L</li> <li>Atau dengan menulis di “catatan daerah” meminta perubahan status. Contoh: “Mohon status diubah menjadi discuss sehingga data dapat diubah”</li> </ul>
		Adanya keinginan Pemda untuk mengubah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebaiknya desa sesuai dengan catatan dari K/L terutama untuk jenis Penugasan (tidak diubah)</li> <li>Untuk usulan yang sebelumnya belum diisi dengan nama desa tertentu, maka input nama desa sesuai dengan lokpri yang telah ditentukan Pusat</li> </ul>
		Adanya kesalahan dalam “Jenis DAK” yang diusulkan (seharusnya penugasan namun mengusulkan ke reguler atau afirmasi dan sebaliknya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan jenis <b>TIDAK DAPAT DIMUNGKINKAN</b> di dalam aplikasi selama proses sinkronisasi</li> <li>Pemda tidak perlu merespon dengan mengubah data apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> <li>Namun jika memang menyetujui catatan Pusat untuk pemindahan dapat menulis di</li> </ul>



No.	Bidang	Isu	Keterangan
			kolom Catatan Daerah “Pemda menyetujui catatan Pusat mengenai dibutuhkannya pemindahan jenis yang lebih relevan” Namun, usulan yang salah tersebut <b>MOHON TIDAK DIHAPUS</b> karena isu ini masih akan diputuskan di tingkat Pusat setelah tanggal 20 Agustus 2018
7.	Sanitasi	Adanya keinginan Pemda untuk mengubah desa atau jika lokasi belum spesifik hingga desa tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaiknya desa sesuai dengan catatan dari K/L terutama untuk jenis Penugasan (tidak diubah)</li> <li>• Untuk usulan yang sebelumnya belum diisi dengan nama desa tertentu, maka input nama desa sesuai dengan lokpri yang telah ditentukan Pusat</li> </ul>
		Adanya kesalahan dalam “Jenis DAK” yang diusulkan (seharusnya penugasan namun mengusulkan ke reguler atau afirmasi dan sebaliknya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan jenis <b>TIDAK DAPAT DIMUNGKINKAN</b> di dalam aplikasi selama proses sinkronisasi</li> <li>• Pemda tidak perlu merespon dengan mengubah data apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> <li>• Namun jika memang menyetujui catatan Pusat untuk pemindahan dapat menulis di kolom Catatan Daerah “Pemda menyetujui catatan Pusat mengenai dibutuhkannya pemindahan jenis yang lebih relevan”</li> <li>• Namun, usulan yang salah tersebut <b>MOHON TIDAK DIHAPUS</b> karena isu ini masih akan diputuskan di tingkat Pusat setelah tanggal 20 Agustus 2018</li> </ul>
8.	Perumahan dan Permukiman	Adanya kesalahan dalam “Jenis DAK” yang diusulkan (seharusnya penugasan namun mengusulkan ke reguler atau afirmasi dan sebaliknya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan jenis <b>TIDAK DAPAT DIMUNGKINKAN</b> di dalam aplikasi selama proses sinkronisasi</li> <li>• Pemda tidak perlu merespon dengan mengubah data apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> <li>• Namun jika memang menyetujui catatan Pusat untuk pemindahan dapat menulis di kolom Catatan Daerah “Pemda menyetujui catatan Pusat mengenai dibutuhkannya pemindahan jenis yang lebih relevan”</li> </ul>

No.	Bidang	Isu	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Namun, usulan yang salah tersebut <b>MOHON TIDAK DIHAPUS</b> karena isu ini masih akan diputuskan di tingkat Pusat setelah tanggal 20 Agustus 2018</li> </ul>
		Adanya keinginan Pemda untuk mengubah desa atau jika lokasi belum spesifik hingga desa tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebaiknya desa sesuai dengan catatan dari K/L terutama untuk jenis Penugasan (tidak diubah)</li> <li>Untuk usulan yang sebelumnya belum diisi dengan nama desa tertentu, maka input nama desa sesuai dengan lokpri yang telah ditentukan Pusat</li> </ul>
9.	Pasar	Adanya catatan Pusat yang meminta untuk menyesuaikan unit cost (menurunkan unit cost), atau mengubah nama pasar atau perubahan data lainnya sementara status “approve”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status usulan harus “Discuss” agar dapat diubah datanya</li> <li>Cara perubahan merujuk kepada manual (bisa dengan klik “belum terdaftar” ketika menu untuk ubah data sudah terbuka dan ketik nama pasarnya).</li> <li>Agar status dapat berubah discuss (sebelumnya approve), maka OPD atau Bappeda dapat berkoordinasi langsung dengan K/L</li> <li>Atau dengan menulis di “catatan daerah” meminta perubahan status. Contoh: “Mohon status diubah menjadi discuss sehingga data dapat diubah)”</li> </ul>
10.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Adanya catatan dari Pusat “didiskusikan lebih lanjut”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi yang dimaksud adalah diskusi di tingkat Pusat jika tidak ada catatan lainnya</li> <li>Jika ada catatan lainnya (misalnya PPN meminta didiskusikan dan K/L ada catatan spesifik maka diskusi yang dimaksud adalah merespon catatan K/L</li> </ul>
		Adanya catatan dari Pusat bahwa “belum diverifikasi oleh Bappeda provinsi atau Pusat”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini proses verifikasi sudah tidak dapat dilaksanakan</li> <li>Apabila ingin direspon, Pemda dapat menulis keterangan misalnya “Pada prinsipnya Bappeda provinsi mendukung usulan tersebut”</li> </ul>

No.	Bidang	Isu	Keterangan
		Adanya catatan dari K/L “Perhatikan proposal/TOR”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan tersebut dikarenakan TOR tidak rinci dan standar biaya yang terlalu tinggi</li> <li>Mohon disesuaikan dengan standar biaya, kemudian upload di google drive</li> <li>Masukkan link google drive tersebut di dalam catatan daerah misalnya <i>“TOR telah disesuaikan dengan Standar Biaya dan dibuat lebih rinci. TOR dapat diunduh dari link <a href="https://drive.google.com/open?id?=1pnIPxZy">https://drive.google.com/open?id?=1pnIPxZy</a>”</i></li> </ul>
		Dokumen pendukung yang diminta untuk pembangunan sarpras gedung diminta untuk dilengkapi dengan TOR, RAB yang rinci FS dan DED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mohon siapkan dokumen – dokumen tersebut dan upload ke dalam google drive</li> <li>Masukkan link google drive tersebut di dalam catatan daerah misalnya <i>“TOR telah disesuaikan dengan Standar Biaya dan dibuat lebih rinci. TOR dapat diunduh dari link <a href="https://drive.google.com/open?id?=1pnIPxZy">https://drive.google.com/open?id?=1pnIPxZy</a>”</i></li> </ul>
11.	Kelautan dan Perikanan	Adanya catatan Pusat yang meminta untuk menyesuaikan unit cost (menurunkan unit cost), atau mengubah nama pasar atau perubahan data lainnya sementara status “approve”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status usulan harus “Discuss” agar dapat diubah datanya</li> <li>Cara perubahan merujuk kepada manual (bisa dengan klik “belum terdaftar” ketika menu untuk ubah data sudah terbuka dan ketik nama ruas jalannya).</li> <li>Agar status dapat berubah discuss (tdnya approve), maka OPD atau Bappeda dapat berkoordinasi langsung dengan K/L</li> <li>Atau dengan menulis di “catatan daerah” meminta perubahan status</li> </ul>
		Adanya catatan Pusat “volume, unit cost, dan pagu akan dibahas lebih lanjut pada saat forum Sinkronisasi dengan mempertimbangkan prioritas dan kesiapan daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>“Diskusi yang dimaksud bukan dalam bentuk forum tatap muka Pusat – Daerah melainkan diskusi di tingkat <b>Pusat</b> (antara <i>stakeholder</i> Pusat terkait dengan memperhatikan keterbatasan pagu DAK bidang kelautan dan perikanan)</li> <li>Pemda tidak perlu merespon apapun, termasuk tidak perlu Klik “Submit Perbaikan”</li> </ul>

No.	Bidang	Isu	Keterangan
12.	Pertanian	Adanya catatan Pusat untuk “mengubah sesuai standar biaya”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status usulan harus “Discuss” agar dapat diubah datanya</li> <li>• Agar status dapat berubah discuss (tdnya approve), maka OPD atau Bappeda dapat berkoordinasi langsung dengan K/L. Atau dengan menulis di “catatan daerah” meminta perubahan status</li> <li>• Standar biaya yang diacu dapat diunduh di menu “Dokumentasi” → Lain – lain → SB bidang Pertanian</li> </ul>
13.	Industri Kecil dan Menengah	Adanya catatan dari Pusat bahwa “belum diverifikasi oleh Bappeda provinsi atau Pusat”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini proses verifikasi sudah tidak dapat dilaksanakan</li> <li>• Apabila ingin direspon, Pemda dapat menulis keterangan misalnya “Pada prinsipnya Bappeda provinsi mendukung usulan tersebut”</li> </ul>
14.	Subbidang GOR	Adanya catatan Pusat bahwa usulan ditolak karena melebihi pagu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadar pagu yang dimaksud untuk subbidang GOR adalah Rp.15 M</li> <li>• Dalam proses penilaian, besar pagu usulan menjadi salah satu kriteria penilaian dan jika usulan di atas Rp. 15 Milyar maka akan ditolak</li> </ul>